



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD YAMIN**
2. Jabatan : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
3. NHK : **438757**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.235.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1822 m2/160 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3335 m2/193 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
3. Tanah Seluas 4300 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 40.000.000
9. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 149.450.000

1. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
6. LAINNYA, POLYGON SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
200.000
7. LAINNYA, ONTEL SEPEDA ONTEL Tahun 1957, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	145.630.007
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.611.080.007
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.611.080.007

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.